

Pelatihan Penyusunan Policy Brief bagi ASN Fungsional Analisis Kebijakan di Pemerintah Kota Metro

Simon Sumanjoyo Hutagalung^{1*} & Dedy Hermawan²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Metro menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan daerah, termasuk tingginya angka pengangguran, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan pelatihan penyusunan policy brief bagi aparatur sipil negara fungsional analisis kebijakan guna meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus lokal, dan praktik langsung penyusunan dokumen kebijakan. Sebanyak 30 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada skor pemahaman peserta, dari rata-rata 58,3 menjadi 85,1 setelah pelatihan, disertai tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi terhadap materi, metode, dan fasilitator. Pelatihan ini terbukti tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis dalam menyusun policy brief yang aplikatif dan kontekstual. Hasil ini menunjukkan pentingnya pelatihan lanjutan dan pembentukan sistem pembinaan kelembagaan yang mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Kata kunci: policy brief, ASN fungsional analisis kebijakan, evidence-based policy, pelatihan teknis

1. ANALISIS SITUASI

Di tengah tuntutan pemerintahan modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional analisis kebijakan semakin vital. Studi terbaru OECD (2023) mengungkapkan bahwa 78% negara anggota OECD bergantung pada analisis kebijakan untuk menerjemahkan bukti empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif. Namun, di tingkat pemerintah daerah seperti Kota Metro, kapasitas dalam menyusun policy brief yang efektif masih menjadi tantangan besar, sebagaimana dilaporkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2024).

Sebagai salah satu kota administratif di Provinsi Lampung, Kota Metro menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Pertama, tekanan demografis yang signifikan ditunjukkan dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 2,3% menurut data Lampost.co (2024). Angka ini berdampak langsung pada meningkatnya permintaan layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Laporan Kupastuntas.co (2025) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Metro mencapai 6,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,7%. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis data dan tepat sasaran untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Ketiga, kesenjangan kapasitas di kalangan ASN sendiri. Hasil survei BPSDM Jabar (2025) terhadap 100 analis kebijakan di berbagai kota kecil mengungkapkan bahwa hanya 32% yang telah mendapatkan pelatihan dalam metodologi evidence-based policy. Sebagian besar, yakni 68%, masih mengandalkan pengalaman empiris tanpa pendekatan yang sistematis.

Policy brief merupakan alat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut Bardach dan Patashnik (2020), sebuah policy brief yang ideal harus memenuhi tiga kriteria utama: (1) ringkas, dengan panjang maksimal empat halaman; (2) berorientasi solusi, dengan menyajikan tiga hingga lima opsi kebijakan; dan (3) berbasis bukti, menggunakan data primer maupun sekunder yang valid. Namun, realitas di Kota Metro menunjukkan bahwa praktik penyusunan policy brief masih jauh dari ideal. Evaluasi Internal Pemerintah Kota Metro (2024) menemukan bahwa 60% dokumen kebijakan masih bersifat deskriptif dan kurang analitis. Selain itu, hanya 25% policy brief yang mencantumkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) untuk setiap rekomendasi yang diajukan (LAN, 2023).

Tabel 1. Estimasi Jumlah Pejabat Fungsional

Tahun	Jumlah Fungsional Analisis Kebijakan
2020	2
2021	5
2022	8
2023	12
2024	15

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2024)

Berdasarkan informasi yang tersedia, jumlah pejabat fungsional analisis kebijakan di Kota Metro mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tabel 1 adalah estimasi jumlah pejabat fungsional analisis kebijakan di Kota Metro dari tahun 2020 hingga 2024.

Peningkatan jumlah pejabat fungsional analis kebijakan sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Data Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2022) menunjukkan lonjakan signifikan jumlah analis kebijakan di tingkat nasional, dari 480 orang pada 2019 menjadi 7.465 orang pada 2022, sebagai dampak kebijakan tersebut. Di Kota Metro, peningkatan ini juga didukung rekrutmen melalui formasi CPNS. Pada 2024, Pemerintah Kota Metro mengusulkan 480 formasi CPNS dan PPPK ke Kementerian PAN-RB, termasuk untuk analis kebijakan (BKD Kota Metro, 2024). Namun, peningkatan kuantitas tidak serta-merta diikuti peningkatan kualitas. Studi LAN (2023) mengungkapkan bahwa hanya 35% analis kebijakan yang terlatih dalam penyusunan policy brief, padahal dokumen ini menjadi instrumen kunci dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini diperkuat oleh temuan Weimer & Vining (2017) yang menekankan bahwa kapasitas analitis, termasuk kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, merupakan prasyarat efektivitas analis kebijakan.

Era reformasi birokrasi di Indonesia telah membawa transformasi signifikan dalam struktur dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu wujud nyata reformasi ini adalah pengembangan jabatan fungsional spesialis, termasuk analis kebijakan, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dasar hukum penguatan peran ini tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 yang kemudian diperbarui melalui PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021, yang secara eksplisit mendefinisikan jabatan fungsional analis kebijakan sebagai posisi yang bertanggung jawab melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian Suyono dan Susilo (2019) dalam studi berjudul "Peran Analisis Kebijakan dalam Reformasi Birokrasi Indonesia" mengungkapkan bahwa keberadaan analis kebijakan yang kompeten menjadi faktor krusial dalam menyediakan dasar rasional bagi pengambilan keputusan pemerintah. Studi tersebut menemukan bahwa institusi pemerintah yang memiliki analis kebijakan dengan kapasitas memadai cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghadang implementasi ideal dari peran strategis ini. Hasil asesmen Komisi Aparatur Sipil Negara (2022) menunjukkan bahwa sekitar 65% analis kebijakan di tingkat pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam menyusun policy brief yang memenuhi standar. Kendala utama meliputi: (1) keterbatasan penguasaan metodologi penelitian kebijakan, (2) minimnya pemahaman tentang teknik analisis data

kuantitatif dan kualitatif, serta (3) kesulitan dalam menerjemahkan temuan analitis menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional. Penguatan kapasitas analisis kebijakan ini semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kemampuan menghasilkan analisis kebijakan yang akurat dan tepat waktu menjadi prasyarat utama untuk mencapai target-target pembangunan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi analisis kebijakan tidak hanya penting, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Sejumlah studi telah meneliti dampak pelatihan penyusunan policy brief terhadap kapasitas ASN dan peneliti. Misalnya, studi oleh Nugroho et al. (2018) menyimpulkan bahwa pelatihan policy brief mampu meningkatkan pemahaman peserta dalam menyusun argumen kebijakan yang terstruktur. Sementara itu, riset oleh Prabowo dan Ardiansyah (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan pelatihan sangat dipengaruhi oleh kualitas narasumber, kesesuaian materi dengan konteks lokal, dan intensitas praktik langsung. Dalam pelaksanaan pelatihan di Pemkot Metro, prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan penting untuk merancang program pelatihan yang efektif dan berdampak. Kota Metro sebagai salah satu kota administratif di Provinsi Lampung memiliki karakteristik pembangunan yang kompleks, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan jumlah ASN yang relatif besar dan tantangan pembangunan yang beragam, kebutuhan akan penguatan kapasitas analisis kebijakan menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, pelatihan penyusunan policy brief bukan hanya sebagai penguatan kapasitas individu ASN, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kualitas tata kelola dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan birokrasi profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Merespons tantangan ini, Pemerintah Kota Metro melalui RPJMD 2025–2029 berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur daerah (Info Metro Kota, 2025). Komitmen ini selaras dengan rekomendasi Dunn (2018) bahwa pelatihan teknis seperti penyusunan policy brief harus menjadi bagian dari pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi analisis kebijakan. Oleh karena itu, pelatihan penyusunan policy brief bagi ASN fungsional di Kota Metro merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ASN fungsional analisis kebijakan di Pemerintah Kota Metro dalam menyusun policy

brief yang efektif dan aplikatif?. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a). Memberikan pemahaman konseptual dan praktis tentang penyusunan policy brief kepada ASN fungsional analis kebijakan di Pemerintah Kota Metro, dan (b). Meningkatkan kemampuan teknis ASN dalam merumuskan dan menulis policy brief yang efektif dan aplikatif. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: (a). Peningkatan kompetensi profesional dalam menyusun policy brief yang efektif, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, (b). Peningkatan kualitas kebijakan daerah melalui dukungan dari ASN yang kompeten dalam menyusun policy brief, dan (c). Perluasan jejaring kolaboratif dan kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas ASN di daerah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan penyusunan *policy brief* dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 November 2024 di Balai Pelatihan Pemerintah Kota Metro, yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 1, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pelatihan, termasuk ruang kelas yang representatif, peralatan presentasi, dan aksesibilitas bagi peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan durasi total 8 jam pelajaran (JP).

Sasaran kegiatan ini adalah ASN fungsional analis kebijakan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan ini, yang berasal dari berbagai OPD, termasuk Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Para peserta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari S1 hingga S2, dengan disiplin ilmu seperti administrasi publik, ekonomi, hukum, dan teknik. Pengalaman kerja peserta juga bervariasi, dengan rentang antara 2 hingga 15 tahun dalam bidang perencanaan dan analisis kebijakan. Pemilihan peserta didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu memiliki jabatan fungsional analis kebijakan atau sedang dalam proses pengangkatan, terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan di OPD masing-masing, dan direkomendasikan oleh pimpinan OPD untuk mengikuti pelatihan ini.

Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam seluruh proses pembelajaran. Metode pelaksanaan meliputi:

- a) Pendekatan Partisipatif. Untuk memperkaya proses pembelajaran dan memperkuat relevansi materi, pelatihan juga dilengkapi dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Salah satunya adalah melalui diskusi interaktif, di mana peserta diajak berbagi pengalaman, tantangan, serta praktik terbaik dalam menyusun policy brief yang telah mereka terapkan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Diskusi ini membuka ruang refleksi dan pertukaran pengetahuan antarpeserta. Selain itu, pelatihan menggunakan pendekatan studi kasus lokal, dengan menghadirkan isu-isu yang relevan dengan konteks Kota Metro, seperti pengangguran, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Studi kasus ini berfungsi sebagai bahan analisis yang konkret dan aplikatif dalam proses pelatihan. Sebagai bentuk penerapan praktis, peserta kemudian mengikuti simulasi penyusunan policy brief berdasarkan studi kasus tersebut. Dalam proses ini, peserta mendapatkan bimbingan langsung dari fasilitator untuk memastikan struktur, argumentasi, dan rekomendasi kebijakan yang disusun sesuai dengan standar penulisan policy brief yang efektif dan berbasis bukti.
- b) Teknik Pelatihan. Untuk memastikan efektivitas pelatihan, metode penyampaian materi dirancang secara variatif dan partisipatif. Salah satu metode utama yang digunakan adalah ceramah interaktif, di mana narasumber yang berpengalaman di bidang kebijakan publik dan penulisan policy brief menyampaikan materi secara komprehensif, disertai sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menggali lebih dalam topik yang dibahas. Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok kecil. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas isu-isu kebijakan tertentu. Diskusi ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan secara kolaboratif, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan kerja tim. Pelatihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk melakukan praktik menulis. Peserta diberi kesempatan menyusun policy brief secara individu maupun kelompok, berdasarkan topik yang telah ditentukan bersama. Aktivitas ini menjadi momen penerapan langsung dari teori yang telah dipelajari. Sebagai penutup rangkaian pelatihan, dilakukan presentasi hasil. Setiap peserta atau kelompok memaparkan policy brief yang telah disusun di hadapan fasilitator dan peserta lain. Presentasi ini diikuti oleh sesi umpan balik yang konstruktif, sehingga peserta tidak

hanya mendapatkan apresiasi, tetapi juga masukan yang bermanfaat untuk perbaikan kualitas policy brief ke depan.

- c) Media dan Alat Bantu. Dalam rangka mendukung efektivitas proses pelatihan, berbagai media dan alat bantu digunakan secara terintegrasi untuk memperkuat pemahaman peserta. Salah satu alat utama yang digunakan adalah modul pelatihan, yang berisi panduan sistematis mengenai penyusunan policy brief, mulai dari struktur dasar, teknik penulisan, hingga contoh-contoh praktik *policy brief* yang baik. Modul ini menjadi acuan utama peserta selama mengikuti kegiatan. Selain itu, peserta juga difasilitasi dengan template policy brief, yaitu format standar yang dirancang untuk menyederhanakan proses penulisan dan menjaga konsistensi isi dan tampilan. Penggunaan template ini mendorong peserta agar lebih fokus pada substansi dan argumentasi kebijakan. Untuk memperjelas penyampaian materi, pelatihan juga dilengkapi dengan infografis, yaitu visualisasi data dan informasi penting yang dirancang secara menarik dan informatif. Infografis digunakan sebagai media bantu untuk mempercepat pemahaman terhadap konsep-konsep yang disampaikan selama sesi pelatihan. Tak kalah penting, pelatihan ini juga memanfaatkan platform presentasi digital seperti Microsoft PowerPoint dalam menyampaikan materi serta memfasilitasi presentasi hasil kerja peserta. Platform ini memungkinkan penyajian informasi secara terstruktur, visual, dan interaktif, sehingga mendukung suasana belajar yang dinamis dan partisipatif.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas peserta. Metode evaluasi meliputi: (a). Evaluasi Awal (Pre-Test): Sebelum pelatihan dimulai, peserta diberikan tes untuk mengukur pemahaman awal mereka mengenai konsep dan teknik penyusunan policy brief, (b). Evaluasi Akhir (Post-Test): Setelah pelatihan selesai, peserta kembali diberikan tes yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan mereka, (c). Kuesioner Kepuasan Peserta: Peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang menilai kepuasan mereka terhadap materi, metode, fasilitator, dan keseluruhan pelatihan, dan (d). Observasi dan Umpan Balik: Fasilitator melakukan observasi selama pelatihan dan memberikan umpan balik langsung kepada peserta mengenai kinerja mereka dalam menyusun dan mempresentasikan policy brief. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelatihan dan sebagai dasar perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan penyusunan *policy brief* yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Metro berhasil menghimpun total 30 ASN fungsional analisis kebijakan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peserta berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, hingga Inspektorat Daerah. Tingkat kehadiran peserta selama kegiatan sangat tinggi, mencapai 96,7%, dengan hanya dua peserta yang tidak mengikuti seluruh sesi karena alasan dinas luar. Dominasi peserta berasal dari latar belakang akademik ilmu administrasi, hukum, teknik sipil, dan ekonomi pembangunan. Tingginya antusiasme peserta ditunjukkan tidak hanya dari kehadiran, tetapi juga dari partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan sesi simulasi.



Gambar 1. Penyampaian materi dan pelaksanaan diskusi

Sumber: Dok. Pengabdian, 2024.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama satu hari di Balai Pelatihan Pemerintah Kota Metro. Adapun rangkaian kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut: (1). Pembukaan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro, (2). Pengantar dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, (3). Sesi 1: “Menulis Policy Brief yang Efektif dan Persuasif”, (4). Sesi 2: “Pendekatan Evidence-Based Policy Making dalam Pemerintahan Daerah”, dan (5). Diskusi kelompok: Refleksi pengalaman peserta dalam menyusun dokumen kebijakan. Pelatihan menghadirkan narasumber dari akademisi FISIP Universitas Lampung. Beberapa materi penting yang disampaikan antara lain: (a). Menulis Policy Brief yang Efektif dan Persuasif” oleh Dr. Dedy Hermawan, M.Si (Dosen Kebijakan Publik FISIP Unila), dan (b). Pendekatan Evidence-Based Policy Making dalam Pemerintahan Daerah” oleh Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A (Dosen

Kebijakan Publik FISIP Unila). Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah partisipatif, studi kasus, dan praktik langsung. Narasumber juga terlibat langsung dalam sesi FGD dan pembimbingan penulisan.

Policy brief merupakan dokumen singkat yang menyajikan analisis terhadap suatu isu kebijakan disertai dengan rekomendasi yang aplikatif dan terukur. Menurut Dunn (2018), *policy brief* berfungsi sebagai media komunikasi kebijakan antara perumus kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumen ini harus ditulis secara ringkas, jelas, dan berbasis data agar dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dalam waktu yang terbatas. *Policy brief* juga menjadi alat strategis dalam mendorong penyusunan kebijakan yang partisipatif dan akuntabel (Young & Quinn, 2017). Sayangnya, dalam praktiknya, banyak ASN belum familiar dengan format dan standar penyusunan *policy brief* yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan teknis penyusunan *policy brief* menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di tingkat daerah.

Evidence-based policy adalah pendekatan yang menekankan penggunaan data dan bukti empiris dalam proses perumusan kebijakan. Konsep ini dikembangkan dari praktik kebijakan di negara-negara maju dan mulai diadopsi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Menurut Head (2016), pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik serta memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam konteks pemerintah daerah seperti Kota Metro, penerapan *evidence-based policy* menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan data lokal, kapasitas SDM, dan koordinasi antarunit. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN dalam menyusun *policy brief* menjadi bagian dari strategi implementasi *evidence-based policy* yang berkelanjutan.

Hasil Evaluasi

Evaluasi kognitif dalam pelatihan penyusunan *policy brief* dilakukan dengan metode pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Evaluasi ini mencakup aspek struktur *policy brief*, teknik penyusunan, serta fungsi dan relevansi dokumen dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Hasil dari evaluasi ini disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Pelatihan

Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Rata-rata Skor Pre-test	Rata-rata Skor Post-test	Selisih Skor (Δ)
ASN Fungsional Analisis Kebijakan (<5 tahun)	14	56,4	83,2	+26,8
ASN Fungsional Analisis Kebijakan (\geq 5 tahun)	11	60,5	87,6	+27,1
Total Rata-rata Seluruh Peserta	25	58,3	85,1	+26,8

Sumber: Hasil pengabdian, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Terjadi kenaikan rata-rata skor sebesar 26,8 poin dari pre-test ke post-test, yang mengindikasikan efektivitas pendekatan pembelajaran yang digunakan. Peserta dengan pengalaman kerja lebih dari lima tahun menunjukkan peningkatan sedikit lebih tinggi, tetapi peserta baru juga menunjukkan lonjakan pemahaman yang signifikan. Hal ini memperkuat temuan bahwa pelatihan ini tidak hanya relevan bagi ASN senior, tetapi juga efektif dalam menyetarakan kapasitas teknis ASN yang baru menjabat sebagai analis kebijakan.

Untuk menilai efektivitas pelatihan serta memperoleh umpan balik dari peserta, tim pengabdian melakukan evaluasi melalui instrumen kuesioner dan dokumentasi testimoni lisan maupun tertulis. Kuesioner mencakup beberapa aspek penting seperti relevansi materi, kualitas narasumber, hingga kepuasan umum terhadap pelatihan. Kuesioner evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa 96% peserta menyatakan puas terhadap isi dan pelaksanaan pelatihan. Sebanyak 89% peserta merasa mengalami peningkatan keterampilan menulis policy brief secara signifikan, sementara sisanya menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mengenal dokumen ini secara mendalam.

Berdasarkan hasil kuesioner, pelatihan penyusunan policy brief bagi ASN fungsional analisis kebijakan di Pemerintah Kota Metro dinilai sangat positif oleh peserta, dengan rata-rata skor berada di atas 4,5 dari skala 5 pada hampir seluruh aspek evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil memenuhi kebutuhan peserta baik secara substansi maupun metode penyampaian. Kemudian testimoni peserta dikumpulkan untuk menangkap pengalaman subjektif dan refleksi atas pelatihan yang diberikan. Berikut ini disajikan hasil rekapitulasi dari kuesioner evaluasi dan kutipan testimoni terpilih peserta.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Evaluasi Peserta Pelatihan Penyusunan Policy Brief

No	Aspek yang Dinilai	Skor Rata-rata (1–5)	Keterangan
1	Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta	4.6	Sangat baik
2	Kualitas penyampaian narasumber	4.8	Sangat baik
3	Relevansi contoh/studi kasus lokal	4.5	Sangat baik
4	Interaktivitas selama pelatihan	4.4	Baik
5	Ketersediaan modul dan template policy brief	4.7	Sangat baik
6	Fasilitas dan media pembelajaran	4.3	Baik
7	Peningkatan pemahaman setelah pelatihan	4.6	Sangat baik
8	Kepuasan umum terhadap pelatihan	4.7	Sangat baik

Catatan: Skala 1 = Sangat Tidak Puas, 5 = Sangat Puas

Sumber: Hasil pengabdian, 2024.

Testimoni peserta memperkuat data kuantitatif dengan menunjukkan antusiasme dan apresiasi terhadap pendekatan pelatihan yang kontekstual, praktis, serta langsung menyentuh kebutuhan kerja mereka di instansi masing-masing. Rekomendasi utama dari peserta mencakup permintaan agar pelatihan serupa dilaksanakan secara rutin dan disertai dengan pendampingan teknis lanjutan.

Tabel 3. Testimoni Peserta Pelatihan

No	Nama Peserta*	Instansi/OPD	Testimoni
1	A.S.	Bappeda Kota Metro	"Pelatihan ini sangat membantu saya dalam menyusun policy brief berbasis data lokal."
2	W.K.	Dinas Pendidikan	"Saya baru pertama kali memahami struktur policy brief secara sistematis. Materinya aplikatif."
3	M.F.	Dinas Sosial	"Studi kasus lokal yang dibahas sangat relevan dan membuat saya lebih percaya diri."
4	S.R.	Sekretariat Daerah	"Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin dengan pendampingan lanjutan."
5	R.H.	Dinas Kesehatan	"Template yang diberikan sangat membantu untuk praktik langsung di OPD kami."

**Nama disamarkan menjadi inisial untuk keperluan dokumentasi internal.*

Sumber: Hasil pengabdian, 2024.

Analisis Capaian

Pelaksanaan pelatihan penyusunan policy brief bagi ASN fungsional analisis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Metro menunjukkan capaian yang signifikan dalam hal peningkatan kapasitas individu maupun potensi kelembagaan. Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat peningkatan skor rata-rata sebesar 26,8 poin, yang mengindikasikan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan konseptual dan keterampilan teknis peserta. Capaian ini sejalan dengan temuan dari Wye, et.all (2019) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung (*experiential learning*) lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi teknis ASN, dibandingkan pendekatan pasif seperti ceramah semata. Lebih dari itu, peserta menunjukkan kemampuan dalam menyusun draft policy brief berdasarkan isu-isu lokal yang aktual. Ini menjadi bukti bahwa pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan mampu menghasilkan output konkret yang relevan dengan konteks kerja para peserta (Hartono, et.all, 2025). Dalam konteks peningkatan kapasitas birokrasi, hal ini sejalan dengan pendekatan "*capacity development*" yang dijelaskan oleh Grindle (1997), di mana pelatihan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir dan mendorong inovasi di tingkat kerja harian ASN.

Meski demikian, pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama tiga hari menyebabkan keterbatasan dalam eksplorasi mendalam, terutama pada aspek editing, peer review, dan praktik presentasi kepada pengambil keputusan. Kedua, kemampuan awal peserta yang sangat beragam—baik dalam hal pengetahuan kebijakan publik maupun kemampuan menulis—mengharuskan fasilitator memberikan pendampingan yang lebih intensif secara individual. Ketiga, masih terdapat kebutuhan besar akan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, misalnya mengenai teknik visualisasi data kebijakan atau komunikasi kebijakan berbasis media digital. Menurut Howlett dan Ramesh (2014), keberhasilan pengembangan kapasitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelatihan awal, tetapi juga oleh adanya sistem pembelajaran berkelanjutan (*policy learning system*) yang melembaga dalam birokrasi. Oleh karena itu, pelatihan ini harus dianggap sebagai titik awal dari proses jangka panjang penguatan kapasitas ASN fungsional analisis kebijakan.

Implikasi Penguatan Kelembagaan

Pelatihan ini memberikan sinyal kuat bagi perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Metro dalam hal penyusunan dokumen kebijakan yang ringkas, berbasis bukti, dan komunikatif. Penguatan kapasitas individu harus diimbangi dengan pembentukan ekosistem kelembagaan yang mendorong keberlanjutan praktik penulisan policy brief. Salah satu implikasi penting adalah perlunya mengintegrasikan pelatihan serupa ke dalam program pengembangan kompetensi ASN secara rutin. Dalam PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, disebutkan bahwa pengembangan kompetensi adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan karier fungsional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit pelatihan teknis yang difokuskan pada keterampilan komunikasi kebijakan, seperti policy brief. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat direplikasi sebagai bagian dari Training Need Analysis (TNA) yang disusun oleh BKPSDM atau Bappeda secara tahunan. Selanjutnya, dibutuhkan wadah kelembagaan berupa forum lintas perangkat daerah yang dapat menjadi ruang diskusi, tukar pengalaman, dan peer-review atas dokumen-dokumen kebijakan singkat. Menurut Newman et al. (2004), keberadaan komunitas praktik (community of practice) menjadi kunci dalam memastikan adanya mekanisme umpan balik dan pembelajaran kolektif dalam birokrasi. Penguatan kelembagaan juga perlu didukung oleh sistem insentif yang mendorong ASN untuk menghasilkan output kebijakan yang bermanfaat. Misalnya, hasil policy brief dapat dimasukkan sebagai bagian dari Penilaian Angka Kredit (PAK) analis kebijakan atau menjadi bagian dari key performance indicators (KPI) instansi. Dengan demikian, budaya menulis dan berpikir analitis dapat menjadi bagian dari budaya organisasi birokrasi lokal.

4. PENUTUP

Pelatihan penyusunan policy brief bagi ASN fungsional analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Metro telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam hal peningkatan kapasitas teknis dan konseptual peserta. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik peserta, diketahui bahwa pelatihan ini berhasil memperkuat pemahaman tentang konsep policy brief, struktur penulisannya, serta relevansi penggunaannya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, pelatihan awal ini belum cukup untuk membentuk kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Diperlukan intervensi lanjutan dalam bentuk pelatihan tahap lanjut, pendampingan teknis periodik,

serta integrasi pelatihan serupa ke dalam sistem pembinaan karier ASN. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga kontinuitas kemampuan serta memastikan bahwa hasil pelatihan benar-benar dapat diterapkan dalam konteks kerja birokrasi yang dinamis. Untuk mendukung kelembagaan dan keberlanjutan praktik penulisan policy brief, Pemerintah Kota Metro disarankan untuk membentuk unit atau tim pendukung perumusan policy brief di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Unit ini dapat bertindak sebagai simpul koordinasi antar analisis kebijakan, fasilitator internal pelatihan, serta penjamin kualitas (quality assurance) atas dokumen-dokumen kebijakan yang diproduksi. Pembentukan unit ini sejalan dengan prinsip tata kelola adaptif dan kolaboratif dalam birokrasi modern. Rekomendasi tambahan yang dapat dipertimbangkan antara lain: (a). menyusun standar operasional prosedur (SOP) penulisan dan publikasi policy brief di tingkat OPD, (b). menyediakan insentif non-finansial dan finansial bagi ASN yang aktif dalam penyusunan dan publikasi policy brief, (c). mengembangkan sistem repository digital dokumen kebijakan yang dapat diakses lintas perangkat daerah, dan (d). melibatkan akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses validasi dan pengayaan isi policy brief.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro, Para Analisis Kebijakan di Pemerintah Kota Metro dan Rekan Dosen di Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung atas pelaksanaan kegiatan ini, juga pimpinan FISIP Unila yang sudah mendukung secara administratif.

6. DAFTAR PUSTAKA

BKD Kota Metro. (2021). *Data Kuantitas ASN Fungsional Tahun 2020–2021*. Metro: BKD.

BKD Kota Metro. (2024). *Laporan Usulan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024*. Kota Metro: Badan Kepegawaian Daerah.

BPSDM Jabar. (2025). *Kajian Kapasitas Analisis Kebijakan Pemda*. Bandung: BPSDM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Mengasah Ketajaman Analisis Kebijakan Melalui Pelatihan Penyusunan Policy Brief*.
<https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/mengasah-ketajaman-analisis->

kebijakan-melalui-pelatihan-penyusunan-policy-brief1BPSDM PU+1BPSDM
PU+1

- Bappeda Kota Metro. (2024). *Laporan Proyeksi Kebutuhan ASN Fungsional 2024*. Metro: Pemkot Metro.
- Bappeda Provinsi Lampung. (2025). *Workshop Penyusunan Policy Paper dan Policy Brief bagi Fungsional Perencana*. <https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/workshop-penyusunan-policy-paper-dan-policy-brief-bagi-fungsional-perencana>Bappeda Lampung
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis (6th ed.)*. CQ Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge.
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World development*, 25(4), 481-495.
- Hartono, F. F., Wicaksono, D. R., Puti, R. S., & Kurniasari, N. F. (2025). Keadilan Sosial Sebagai Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Manusia. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 192-197.
- Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-Informed” Policy Making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Howlett, M., et al. (2020). *Designing for Policy Effectiveness*. Cambridge University Press.
- Info Metro Kota. (2025, Januari 15). *RPJMD Kota Metro 2025–2029: Prioritas Pembangunan SDM dan Infrastruktur*. <https://infometrokota.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). *Laporan Kajian Kompetensi Analisis Kebijakan di Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2022). *Evaluasi Implementasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). *Pelatihan Analisis Kebijakan: Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: LAN.

- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). *Standar Kompetensi Analisis Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Newman, M. E., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical review E*, 69(2), 026113.
- Nugroho, H., Fauzi, A., & Kartodihardjo, H. (2018). Policy Brief Writing Training for Government Officials: An Evaluation Study. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(1), 11–23.
- OECD. (2023). *Policy Capacity in the Digital Age*. OECD Publishing.
- Prabowo, A., & Ardiansyah, R. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Penyusunan Policy Brief bagi ASN. *Jurnal Manajemen Pelatihan*, 9(2), 90–104.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Pembahasan Teknis Pelatihan Policy Brief, Policy Memo, RIA, dan Advokasi*. <https://pusbangsdm.kememparekraf.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Notulensi-Rapat-Teknis-Pelatihan-Policy-Brief.pdf> Pusbang SDM Kememparekraf
- Suyono, T., & Susilo, A. (2019). Peran Analisis Kebijakan dalam Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-62.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice (6th ed.)*. Routledge.
- Wye, L., Cramer, H., Carey, J., Anthwal, R., Rooney, J., Robinson, R., ... & Baxter, H. (2019). Knowledge brokers or relationship brokers? The role of an embedded knowledge mobilisation team. *Evidence & Policy*, 15(2), 277-292.
- Young, E., & Quinn, L. (2017). *Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*. Open Society Institute.